

ANALISIS PENGARUH INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI PROVINSI SUMATERA BARAT

Kasih Khaira A¹, Rika Widianita²

kasihkhairaagvs@gmail.com¹, rikawidianita@uinbukittinggi.ac.id²

UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi

ABSTRACT

This research aims to analyze the influence of the Human Development Index (HDI) on poverty levels in West Sumatra Province. HDI, which includes the dimensions of education, health and living standards, is considered an important indicator in assessing the quality of development of a region. The data used in this research is secondary, obtained from the Central Statistics Agency (BPS) over a certain time period. The analytical method used is multiple linear regression to determine the relationship between the independent variable (HDI) and the dependent variable (poverty level). The research results show that increasing HDI has a significant effect on reducing poverty levels in West Sumatra Province. Education and health dimensions have a more dominant contribution compared to living standards. These findings indicate that efforts to increase HDI through policies focused on access to education and health can be an effective strategy in reducing poverty levels.

Keywords: Human Development Index, Poverty Rate, West Sumatra Province, Regression Analysis.

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan salah satu masalah utama yang dihadapi negara-negara berkembang seperti Indonesia. Kemiskinan juga merupakan permasalahan kompleks yang dihadapi lintas generasi. Kemiskinan dapat dibedakan berdasarkan sifatnya: kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut adalah kemiskinan yang disebabkan oleh banyaknya penduduk yang hidup di bawah pendapatan minimum yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan papan. Oleh karena itu, seseorang dikatakan miskin apabila ia tidak mampu memenuhi kebutuhannya. Sedangkan kemiskinan relatif merupakan ketimpangan distribusi pendapatan yang menimbulkan ketimpangan ketika masyarakat yakin dapat memenuhi kebutuhan dasarnya namun pendapatannya masih di bawah rata-rata pendapatan masyarakat sekitar.

Kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk mencapai standar hidup minimum. Kebutuhan dasar yang harus dipenuhi antara lain pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat dibedakan menjadi kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif berdasarkan tingkat pendapatan.

- (1) Kemiskinan yang menetap, yaitu kemiskinan yang kronis atau menurun.
- (2) kemiskinan siklis, yang mengikuti pola siklus perekonomian secara keseluruhan;
- (3) Kemiskinan musiman Hal ini dapat dilihat pada kasus nelayan dan petani.
- (4) Kemiskinan yang bersifat aksidental, yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh bencana alam, konflik, kekerasan, atau akibat dari kebijakan tertentu yang mengakibatkan menurunnya tingkat kesejahteraan suatu masyarakat.

Masalah kemiskinan merupakan salah satu masalah utama pada pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi dalam hakekatnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi pada semua sektor pembangunan, pemerataan pembangunan yang optimal, perluasan tenaga kerja dan peningkatan taraf hidup masyarakat. Dalam mencapai tujuan pembangunan secara menyeluruh diperlukan adanya pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan distribusi pendapatan yang merata.

Pemerintah Indonesia menyadari bahwa pembangunan nasional adalah galat satu upaya buat menjadi tujuan masyarakat adil dan makmur. Sejalan menggunakan tujuan tersebut, berbagai kegiatan pembangunan sudah diarahkan pada pembangunan daerah khususnya daerah yang relative mempunyai taraf kemiskinan yang terus naik dari tahun ke tahun.

Pembangunan daerah dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan sesuai prioritas dan kebutuhan masing-masing daerah menggunakan akar dan sasaran pembangunan nasional yang sudah ditetapkan melalui pembangunan jangka panjang dan jangka pendek. Oleh lantaran itu, galat satu indikator utama keberhasilan pembangunan nasional adalah laju penurunan jumlah penduduk miskin.

METODOLOGI

Sesuai dengan uraian dan permasalahan diatas yang telah dikemukakan, Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kuantitatif yang bertujuan untuk mengukur hubungan antara variabel-variabel yang ada, yaitu IPM sebagai variabel independen dan tingkat kemiskinan sebagai variabel dependen. Penelitian ini umumnya menggunakan analisis regresi untuk melihat pengaruh atau hubungan antar variabel. Pengumpulan data yaitu data sekunder, yang diperoleh dari sumber-sumber yang sudah ada, seperti Badan Pusat Statistik (BPS) Data yang digunakan mencakup informasi tahunan tentang IPM dan tingkat kemiskinan yang diperoleh dari sumber resmi. Data ini biasanya disajikan dalam bentuk angka tingkat kemiskinan, yang mencakup persentase penduduk miskin, garis kemiskinan, dan indeks pembangunan manusia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan diantaranya; tingkat pendapatan yang rendah, kesehatan yang rendah, masalah pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat, dan keterbatasan akses terhadap modal. 1 Dan hal seperti ini sering terjadi dinegara berkembang terutama didaerah pedesaan, dan sedikit banyaknya hal ini lah yang menyebabkan kualitas pembangunan menjadi rendah.2 Pendidikan dan kesehatan merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah pembangunan. Dengan pendidikan yang bagus dan kesehatan yang baik akan membuat seseorang akan mudah mendapatkan pekerjaan yang layak, dan pendapatan yang lumayan tinggi. Dan dengan adanya hal tersebut akan membuat kemiskinan berkurang dan meningkatkan kesejahteraan. Beberapa aspek lain yang saling berinteraksi sehingga seseorang jatuh miskin.

Aspek tersebut antara lain aspek ekonomi, kualitas SDM, akses terhadap sarana umum, kebebasan melakukan tindakan sosial dan keagamaan akses terhadap keamanan dan sebagainya. Misalnya, seseorang jatuh miskin tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya karena tidak mendapatkan pekerjaan. Menjadi pengangguran terkait erat dengan rendahnya kualitas dan kompetensi dia untuk dapat memenuhi permintaan pasar tenaga kerja. Salah satu penyebab kualitas rendah adalah karena tidak memiliki akses ke pendidikan dan pelatihan yang memadai.

Beberapa aspek lain yang saling berinteraksi sehingga seseorang jatuh miskin. Aspek tersebut antara lain aspek ekonomi, kualitas SDM, akses terhadap sarana umum, kebebasan melakukan tindakan sosial dan keagamaan akses terhadap keamanan dan sebagainya. Misalnya, seseorang jatuh miskin tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya karena tidak mendapatkan pekerjaan. Jika jumlah pengangguran tinggi, berarti banyak masyarakat yang tidak memiliki pendapatan untuk memenuhi kebutuhannya sehingga mengakibatkan harus mengurangi kebutuhan. Kemiskinan biasanya digambarkan sebagai rendahnya pendapatan

yang dimiliki seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok. Ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhannya karena tidak memiliki pendapatan yang cukup akan mengakibatkan berada digaris kemiskinan. Permasalahan kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks dan bersifat multidimensional oleh karena itu, upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif, sistematis dan massif yang mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat dan dilaksanakan secara terpadu. Istilah kemiskinan muncul ketika seseorang atau sekelompok orang tidak mampu mencukupi tingkat kemakmuran ekonomi yang dianggap sebagai kebutuhan minimal dari standar hidup tertentu.

Salah satu faktor yang menjadi penyebab jumlah penduduk miskin yaitu di tentukan dengan seberapa besar jumlah pengangguran yang ada di suatu wilayah tersebut. Pengangguran bisa Tirtayasa EKONOMIKA Vol. 18, No.1, April 2023 125 disebabkan oleh bertambahnya angkatan kerja baru yang terjadi tiap tahunnya, sementara itu penyerapan tenaga kerja tidak bertambah. Dan masalah pengangguran bertambah serius yang disebabkan perkembangan penduduk yang kian bertambah cepat dan jumlah yang sangat besar.

Dalam ilmu kependudukan (demografi), orang yang mencari kerja masuk dalam penduduk disebut angkatan kerja. Jadi apabila orang yang dalam angkatan kerja tidak bekerja maka disebut pengangguran. Dalam pengangguran terdapat pengangguran terbuka (open unemployment), tenaga kerja yang berada di kota menghadapi masalah pengangguran terselubung (under employment). Dalam pengangguran terbuka jenis ini banyak ditemukan dikota yang sedang berkembang.

Kemiskinan merupakan masalah yang sangat kompleks yang sangat tidak di anjurkan dalam Islam. Islam melarang kepada umatnya untuk meninggalkan keluarganya dalam keadaan lemah dan miskin sesuai dengan firman Allah dalam QS. An Nisa' yang artinya sebagai berikut:

Artinya: dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar. (QS. An-Nisa':9)

Kemiskinan menurut Badan Pusat Statistik adalah ketidakmampuan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makanan maupun non makanan. Dari sisi makanan, BPS menggunakan indikator yang direkomendasikan oleh Widyakarya Pangan dan Gizi tahun 1998 yaitu kebutuhan gizi 2.100 kalori per orang per hari, sedangkan dari sisi kebutuhan non makanan tidak hanya terbatas pada sandang dan papan melainkan termasuk pendidikan dan Kesehatan.

Tabel 1 IPM dan Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Barat

Provinsi Sumbar	IPM	Tingkat Kemiskinan
2021	74,56	370,67
2022	75,16	335,21
2023	75,64	340,37

Berdasarkan Tabel di atas dijelaskan bahwa Indeks Pembangunan Manusia(IPM) pada tahun 2021 Angka 74,56 terjadi penurunan dan Tingkat Kemiskinan Meningkat pada 370,67. Dan Indeks Pembangunan Manusia mengalami kenaikan pada tahun 2023 pada Angka 75,64 dan mengalami penurunan di Angka 340,37.

KESIMPULAN

peningkatan IPM di Provinsi Sumatera Barat berpengaruh positif terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi kualitas pembangunan

manusia (terutama dalam hal pendidikan, kesehatan, dan pendapatan), semakin rendah tingkat kemiskinan yang tercatat di provinsi tersebut. Peningkatan IPM memerlukan kebijakan yang lebih holistik, meliputi pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu merancang dan menerapkan kebijakan yang mendukung pemerataan pembangunan, mengingat kesenjangan pembangunan antar daerah di Sumatera Barat. meskipun terdapat hubungan yang signifikan antara peningkatan IPM dan pengurangan kemiskinan, diperlukan upaya bersama untuk memastikan bahwa seluruh elemen pembangunan berjalan secara merata, agar dampaknya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat di Provinsi Sumatera Barat.

Saran

Berdasarkan hasil analisis, terdapat beberapa saran yang perlu dipertimbangkan untuk meningkatkan kualitas Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan menurunkan tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat. Pertama, pemerintah harus fokus pada peningkatan kualitas pendidikan di seluruh wilayah, terutama di daerah-daerah yang tertinggal, dengan menyediakan fasilitas pendidikan yang lebih baik, pelatihan keterampilan, serta memperluas akses pendidikan tinggi yang terjangkau. Selain itu, peningkatan kualitas dan aksesibilitas layanan kesehatan juga perlu diperhatikan, terutama di daerah-daerah miskin, untuk menurunkan angka kematian dan meningkatkan harapan hidup masyarakat. Program kesehatan yang menasar pencegahan penyakit serta edukasi kesehatan juga dapat meningkatkan kualitas hidup.

Selanjutnya, pengembangan ekonomi lokal menjadi kunci penting dalam pengentasan kemiskinan. Pemerintah harus mendukung sektor-sektor potensial seperti pertanian, pariwisata, dan UMKM melalui pelatihan keterampilan dan pemberian akses modal usaha, sehingga masyarakat dapat meningkatkan pendapatan dan mengurangi ketergantungan pada bantuan sosial. Pembangunan infrastruktur yang merata, seperti perbaikan transportasi, akses internet, dan listrik, juga perlu dipercepat untuk meningkatkan konektivitas antar daerah dan membuka peluang ekonomi baru. Selain itu, program perlindungan sosial, seperti bantuan langsung tunai dan program bantuan pangan, harus diperkuat untuk memastikan kelompok masyarakat yang rentan mendapat dukungan yang memadai.

Penting juga untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, sehingga kebijakan yang diterapkan lebih relevan dengan kebutuhan lokal. Terakhir, daerah dengan IPM rendah dan tingkat kemiskinan tinggi harus mendapat perhatian khusus dari pemerintah provinsi, dengan merancang program pembangunan yang lebih terfokus dan adaptif terhadap kondisi setempat. Koordinasi yang baik antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota juga sangat diperlukan agar kebijakan yang dijalankan lebih efisien dan dapat mencapai hasil yang optimal. Dengan mengintegrasikan seluruh elemen ini, diharapkan Provinsi Sumatera Barat dapat mengalami kemajuan signifikan dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adawiyah, S. E. (2020). Kemiskinan Dan Faktor-Faktor Penyebabnya. *Journal Of Social Work and Social Service*.
- Anggraini, D. (2023). Pengangguran Terhadap Kemiskinan Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi. *Jurnal Tirtayasa Ekonomika*, Universitas Islam Negeri (UIN Raden Intan Lampung).
- Bakti, N. A. (2014). Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Di Indonesia Periode 2008-2012. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*.
- Djohanputro, B. (2006). *Prinsip-Prinsip Ekonomi Makro*. Jakarta: PPM.
- Michael P. Todaro, e. a. (2011). *Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Utami, F. P. (2020). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia(IPM), Kemiskinan Pengangguran

Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Aceh. Jurnal Samudera Ekonomika.
Yustika, A. E. (2013). Ekonomi Kelembagaan Paradigma, Teori dan Kebijakan. Jakarta: Erlangga.